

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG  
NARKOTIKA MELALUI FUNGSI ASESMEN DALAM UPAYA  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA  
(Studi Di Kepolisian Sektor Aceh Selatan)**

**ABSTRAK**

**HEFI BACHRI \***

Wajib lapor pecandu narkoba sebagai sebuah upaya untuk memenuhi hak pecandu narkoba dalam mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum *asesmen* dalam upaya penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, bagaimana mekanisme *asesmen* terpadu dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba, bagaimana hambatan dan upaya *asesmen* dalam upaya penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatif.

Pengaturan hukum *asesmen* dalam upaya penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Mekanisme *asesmen* terpadu dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hambatan *asesmen* dalam upaya penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri di antaranya, Kontradiksi pengaturan Pasal tentang rehabilitasi. Upaya mengatasi hambatan adalah diperlukannya peninjauan kembali regulasi yang sekiranya memberatkan pelaksanaan program terutama mengenai waktu maksimal pengajuan permohonan *asesmen* terpadu oleh penyidik

**Kata Kunci: Implementasi, Narkoba, Asesmen**

\*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 35 OF 2009 REGARDING  
NARCOTICS THROUGH THE ASSESSMENT FUNCTION IN AN  
EFFORT SETTLEMENT OF THE CRIMINAL ACTION  
OF ABUSE NARCOTICS  
(Study in South Aceh Sector Police)**

**ABSTRACT**

**HEFI BACHRI \***

*Obligation to report narcotics addicts as an effort to fulfill the rights of narcotics addicts to receive treatment or care through medical rehabilitation and social rehabilitation. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the legal assessment in an effort to resolve narcotics abuse for oneself, what is the integrated assessment mechanism in resolving narcotics abuse cases, what are the obstacles and assessment efforts in efforts to resolve narcotics abuse for oneself.*

*This type of research is research using normative juridical and empirical juridical approaches. Data collection in this study was carried out through literature study, where the materials or data obtained would be arranged systematically and analyzed using qualitative scientific logic procedures.*

*The legal arrangements for assessment in an effort to resolve the crime of narcotics abuse for oneself are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and based on Government Regulation Number 25 of 2011 concerning the Mandatory Reporting of Narcotics Addicts. An integrated assessment mechanism in resolving cases of narcotics abuse of narcotics addicts who are old enough or their families or parents or guardians of narcotics addicts who are not old enough to the receiving institution is obliged to report for treatment or care through medical rehabilitation and social rehabilitation.*

*The results of the study show that the obstacles to assessment in efforts to resolve criminal acts of narcotics abuse for oneself include contradictions in the provisions of the article regarding rehabilitation. Efforts to overcome obstacles are the need to review regulations that are burdensome for program implementation, especially regarding the maximum time for submitting requests for integrated assessment by investigators.*

**Keywords: Implementation, Narcotics, Assessment**

*\* Student of the Postgraduate Program in the Law Science Program of the Islamic University of North Sumatra.*